



RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN SIAP
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

اَلْسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak 2025-2029. Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan selama lima tahun ke depan

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan dinamika perubahan kebijakan nasional dan tuntutan reformasi birokrasi. Fokus utama kami adalah mewujudkan manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan berbasis sistem merit guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Dalam dokumen ini, tertuang tujuan, sasaran berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang akan dicapai melalui berbagai program prioritas, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, hingga peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparatur

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak 2025-2029 ini, semoga memberikan instrumen perencanaan dan kendali yang efektif dalam mencapai target kinerja organisasi yang telah ditetapkan guna terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kabupaten Siak yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima, berintegritas dan humanis.

Siak Sri Indrapura, 15 Januari 2026

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK	9
2.1. Tugas dan Fungsi.....	9
2.2. Sumber Daya.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan	18
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	31
2.5. Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis	39
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1. Tujuan	43
3.2. Sasaran.....	43
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi	44
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
4.1. Uraian Program.....	48
4.2. Uraian Kegiatan.....	49
4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	50

4.4 Sub kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas Daerah.....	53
4.5 Indikator Kinerja Utama.....	55
4.6 Indikator Kinerja Kunci.....	56
BAB VIII. PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS	
TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN	
TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	
TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH	
TABEL 4.3.v2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	
TABEL 4.3.v2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERLOKASI DAN PENDANAAN	
TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA	
TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI	



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045), maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 untuk menyusun anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebgai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN.
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Perangkat Daerah dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun, Renstra PD ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau

urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, serta berbagai peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang perencanaan di tingkat daerah. Regulasi ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan disusun berdasarkan asas kesinambungan, keselarasan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Riau dengan RPJMD Kabupaten Siak, selain itu juga keselarasan antara RPJMD Kabupaten Siak dengan Renstra Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Siak agar bekerja dengan profesional dalam memberikan pelayanan public yang prima dan berkompeten dalam melaksanakan tata Kelola pemerintahan, karena pada dasarnya seorang Aparatur Sipil Negara diamanahkan jabatan sebagai pelayan bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak sangat berperan penting dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan pemerintah dari pusat sampai ke daerah

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2025-2029. Pada RPJMN tersebut terdapat Misi yang disebut dengan Asta Cita Presiden, dan BKPSDM mendukung Asta Cita yang ke tujuh yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Untuk mewujudkan asta cita diperlukan SDM yang berkualitas, kompeten, berintegritas dan inovatif. Bidang SDM dalam pemerintahan bertanggungjawab untuk merumuskan dan melaksanakan program-program peningkatan kualitas ini mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, hingga sistem reward dan punishment, dan juga harus selaras dengan Misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitu “Transformasi tata kelola pemerintahan, menciptakan sistem pemerintahan yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan”, dan mendukung tercapainya Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, dengan salah satu Misinya

yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan mendorong transparansi dan partisipasi untuk peningkatan pelayanan public yang berintegritas dan humanis,

Maka dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 ini sebagai wujud komitmen dan pedoman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dalam menjabarkan dan mengimplementasikan program dan kegiatan yang terencana dan bertahap selama lima tahun kedepan yang mendukung program-program Bupati Siak terpilih periode 2025-2029

1.2. Dasar Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJP) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5)
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 118)
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2026 Nomor 33)

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun lima tahun kedepan (2025-2029)

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan dan menyelaraskan arah pembangunan daerah Kabupaten Siak sesuai Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 ke dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak
2. Menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dalam menyusun rencana kerja tahunan.
3. memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak yang akan dicapai sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur
4. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Rencana strategis berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana strategis OPD

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK

2.1. Gambaran Pelayanan

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan lima (5) tahun terakhir dari 2020-2024 dan data-data yang relevan sesuai dengan kebutuhan,

- a. Uraian Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak
- b. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
- c. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
- d. Kelompok Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.

2.2 Permasalahan dan isu strategis

Identifikasi Permasalahan berkaitan dengan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, rumusan masalah merupakan kesenjangan antara realita dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan yang mempengaruhi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak

- 3.2 Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak
- 3.3 Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak
- 3.4 Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK

2. 1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, merupakan penunjang urusan pemerintah daerah di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Administrasi Kepegawaian
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan di bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum perkantoran, Penyusunan Program dan penyelenggaraan administrasi keuangan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah;
- f. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang meliputi pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi kepangkatan, mutasi, jabatan, pengadaan, data dan informasi kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi kepangkatan, mutasi, jabatan, pengadaan, data dan informasi kepegawaian;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Administrasi Kepegawaian;
- c. pembinaan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;

- d. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
- e. penyiapan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur agar berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan meliputi pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pengembangan pendidikan formal pegawai serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir, Pendidikan dan Pelatihan struktural, Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan teknis serta pendidikan formal pegawai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- c. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
- e. penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

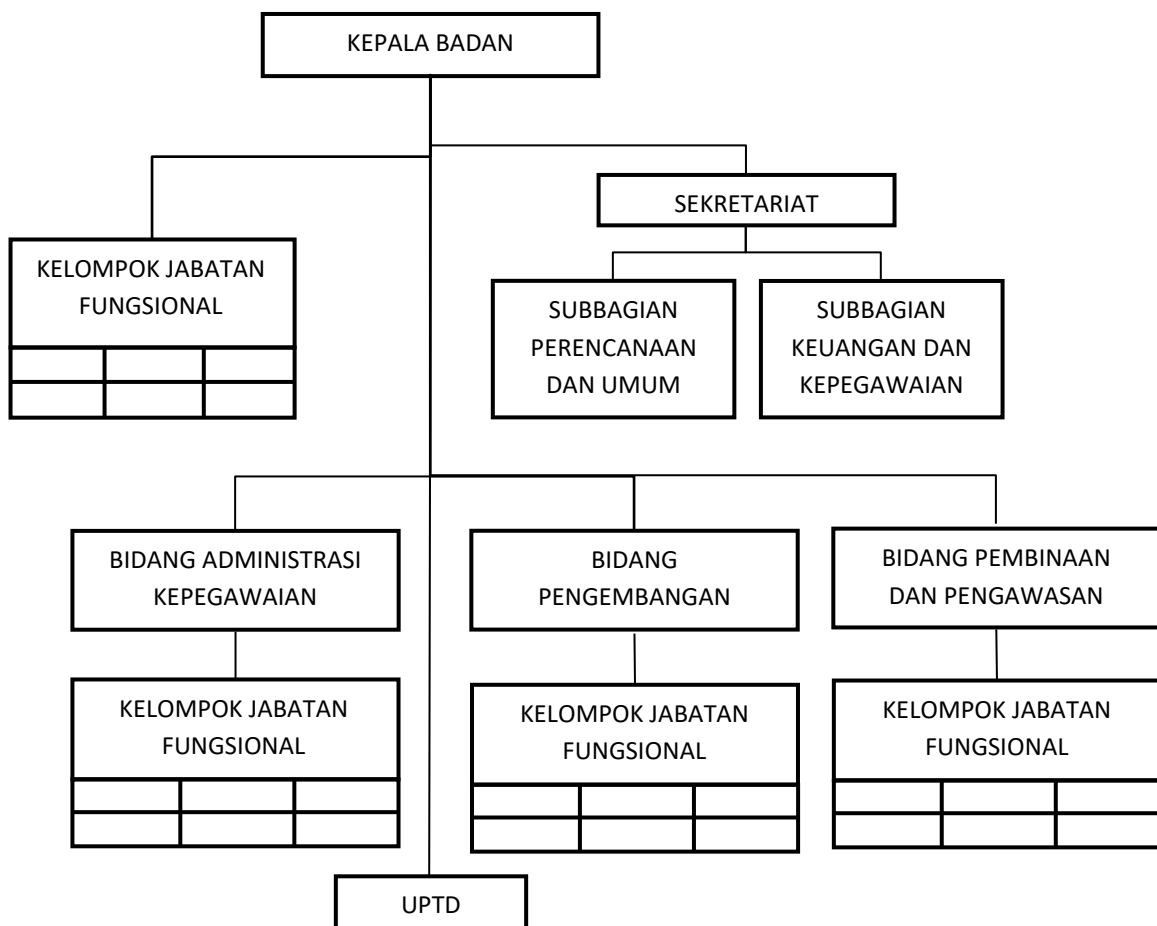
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang meliputi penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai dan kinerja pegawai serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan, kesejahteraan dan kinerja pegawai;

- b. pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur;
- c. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- d. penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupa ten Siak sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Struktur Organisasi BKPSDMD Kab. Siak



2. 2. SUMBER DAYA

2. 2. 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia sebagai penggerak organisasi merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Berdasarkan DUK BKPSDMD Kabupaten Siak tahun 2024, jumlah pegawai sebanyak 40 orang yang terdiri dari 36 PNS dan 4 PPPK, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Aparatur Sipil Negara BKPSDMD Kabupaten Siak Menurut Jabatan					
NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH		%	
		LK	PR	LK	PR
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	2.08%	0.00%
2	Pejabat Administrator	4	0	8.33%	0.00%
3	Pejabat Pengawas	1	1	2.08%	2.08%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	2	6	4.17%	12.50%
5	Pejabat Pelaksana	17	16	3.00%	33.33%
JUMLAH		25	23	52%	48%
<i>Sumber Data : DUK BKPSDMD Tahun 2025</i>					
Jumlah Aparatur Sipil Negara BKPSDMD Kabupaten Siak Menurut Pangkat/Golongan					
NO	PANGKAT/ GOL RUANG	JUMLAH		%	
		LK	PR	LK	PR
1	Golongan IV/ c	0	0	0.00%	0.00%
2	Golongan IV/ b	0	1	0.00%	2.08%
3	Golongan IV/ a	1	0	2.08%	0.00%
4	Golongan III/d	6	6	12.50%	12.50%
5	Golongan III/c	1	2	2.08%	4.17%
6	Golongan III/b	2	3	4.17%	6.25%
6	Golongan III/a	6	1	12.50%	2.08%
4	Golongan II/d	0	1	0.00%	2.08%
5	Golongan II/c	3	1	6.25%	2.08%
6	PPPK Golongan IX	4	7	200.00%	350.00%
6	PPPK Golongan VII	0	1	0.00%	2.08%
6	PPPK Golongan V	1	1	2.08%	2.08%
JUMLAH		24	24	50%	50%
<i>Sumber Data : DUK BKPSDMD Tahun 2024</i>					
Jumlah Aparatur Sipil Negara BKPSDMD Kabupaten Siak Menurut Pendidikan					
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		%	
		LK	PR	LK	PR
1	Sarjana Strata III (S.3)		1	0.00%	25.00%
1	Sarjana Strata II (S.2)	2	1	4.17%	2.08%
2	Sarjana Strata I (S.1)/ Diploma IV	20	19	41.67%	39.58%
3	Diploma III (D III)	1	1	2.08%	2.08%
4	SLTA Sederajat	3	1	6.25%	2.08%
JUMLAH		26	22	54%	46%
<i>Sumber Data : DUK BKPSDMD Tahun 2024</i>					

DAFTAR URUT KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK 31 DESEMBER 2024																			
NO	NAMA / T. TGL. LAHIR	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT DAN GOLONGAN	TMT	JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN				MUTASI KEPEGAWAIAN	UNIT KERJA
						NAMA	T.M.T	ESELON	Thn	Bln	NAMA	BLN DAN TAHUN	JMH JAM	NAMA	JURUSAN	TAHUN LULUS	TK. DAJAZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	H. ZULFIKRI, S.Sos, MM Dumai, 05 Juli 1969	19690705 199002 1 002	L	Pembina Utama Muda (IV/c)	01 April 2018	Kepala Badan	21 Maret 2022	II/b	34	10	- DIKLAT PRA JABATAN TK.II - DIKLAT ADUM - DIKLAT PIM TK.III - DIKLAT PIM TK. II	1990 1999 2003 2009	250 360	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	MANAJEMEN DAN BISNIS	2008	S2	1 Calon PNS Pusat Depdagri pada Daerah Otonom Tk. I Riau 2 Pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau (Tubel APDN Pekanbaru) 3 Pegawai Kantor Camat Dumai Barat 4 Pjs. Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanah Putih 5 Pegawai Kantor Camat Dumai Barat 6 Pegawai Kantor Camat Bunguran Timur 7 Sekretaris Camat Bunguran Barat 8 Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Siak 9 Pj. Kasubbag TU Disnaker Kabupaten Siak 10 Kasubbag TU Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Siak 11 Pj. Kasubbag TU Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Siak 12 Pj. Camat Lubuk Dalam Kantor Camat Lubuk Dalam 13 Pj. Camat Sungai Apit 14 Staf Sekretariat Daerah Kab. Siak 15 Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 16 Kabag TU Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 17 Sekretaris Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak 18 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Siak 19 Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Siak 20 Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Siak 21 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak 22 Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Siak 23 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
2	NOFITRIZAL, SH Siak Sri Indrapura, 08-11-1973	19731108 200212 1 004	L	Pembina Tk.I (IV/b)	01 April 2023	Sekretaris	17 Oktober 2022	III/b	23	0	- LPJ - DIKLATPIM TK. IV - BIMTEK PENYULUHAN HUKUM - SOSIALISASI PUTUSAN MPR RI - DIKLATPIM TK. III	2003 2007 2003 2006	285	UNIVERSITAS ISLAM RIAU	HUKUM	2001	S1	1 Kasubbag Dokumentasi Hukum Sekda Kab. Siak 2 Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan SetdaKab. Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
3	MARFANIS,S.Sos	19720306 200212 1 004	L	Pembina (IV/a)	01 Oktober 2017	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	17 Oktober 2022	III.b	23	0	- DIKLAT PRA JABABATAN GOLONGAN III - DIKLATPIM IV - DIKLATPIM TK. III	2023 2006 2010	135 285 345	UIR PEKANBARU	S-1 SOSIAL POLITIK	1999	S1	Kantor Pengolahan Pasar dan Kebersihan pada Pemerintah Kabupaten Siak Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak Satuan Polisi Pamong Praja pada Kabupaten Siak Kantor Camat Lubuk Dalam pada Pemerintah Kabupaten Siak Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	BKPSDMD Kabupaten Siak
4	NANI PUTRI, S.Sos Siak Sri Indrapura, 20 Oktober 1971	19711020 200212 2 003	P	Penata TK. I (III/d)	01 April 2018	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	31 Agustus 2023	-	23	0	- LPJ - DIKLAT PIM IV	05/2003	216	UNIVERSITAS LANCANG KUNING	ADMINISTRASI NEGARA	2007	S1	1 Kasubbid Diklat Teknis 2 Kasubbid Kesejahteraan Pegawai BKD	BKPSDMD Kabupaten Siak
5	RAJA RAFILLA RAWAN, S. S, MM Siak Sri Indrapura, 14 Des 1978	19781214 201001 1 002	L	Penata TK. I (III/d)	01 April 2018	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	04 Januari 2017	-	14	11	- LPJ - DIKLATPIM TK. IV	2010 2016	174 917	UNILAK	SASTRA INGGRIS	2005	S2	1 DPPKAD	BKPSDMD Kabupaten Siak

6	RAHMAT KUSRIONO, S.H Ranai, 04 Agustus 1984	19840804 201102 1 002	L	Penata TK. I (III/d)		Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	17 Oktober 2022	-	13	10	- LPJ - DIKLATPIM TK. IV	10/2011	216	UNIVERSITAS ISLAM RIAU	ILMU HUKUM	2008	S1	-	BKPSDMD Kabupaten Siak
7	ALTIKA NINGSIH, SE Siak, 10 Januari 1992	19920110 201504 2 001	P	Penata TK. I (III/d)	01 April 2019	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	31 Agustus 2023	-	9	8	- PELATIHAN DASAR	2017	1141	IPB	EKONOMI PEMBANGUNAN	2013	S1	-	BKPSDMD Kabupaten Siak
8	M. ASMARIA SYARIF, S.Sos Pekanbaru, 2 Agustus 1982	19820802 200604 1 007	L	Penata TK. I (III/d)	01 April 2020	Penelaah Teknis Kebijakan Bidan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2 September 2024	-	18	8	- Diklat Prajab II - DIKLAT PIM IV	2006 2015	90 867	UNRI	ADMINISTRASI NEGARA	2006	S1	1 CPNS Kecamatan Koto Gasib 2 PNS Kecamatan Koto Gasib 3 Kasubag Keuangan Kecamatan Koto Gasib 4 Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Koto Gasib 5 Analisis Pengembangan Karir pada BKPSDMD	BKPSDMD Kabupaten Siak
9	FURY LESTARI, S.Kom Pekanbaru, 22 Januari 1980	19800122 200903 2 002	P	Penata TK. I (III/d)	01 Oktober 2020	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	31 Agustus 2023	-	15	9	- LPJ	09/2010	216	UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA	SISTEM INFORMASI KOMPUTER	2003	S1	1 Fungsional BKD 2 Kasubid Kesejahteraan Pegawai	BKPSDMD Kabupaten Siak
10	YANDINATA AHMAD, S.Kom Napar, 22 Januari 1983	19830122 200903 1 002	L	Penata TK. I (III/d)	01 Oktober 2020	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum	04 Januari 2017	-	15	9	- LPJ - DIKLATPIM TK. IV	09/2010 12/2018	216 893	UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA"YPTK"	SISTEM INFORMASI KOMPUTER	2007	S1	1 Fungsional BKD 2 Kasubag Umum dan Perencana	BKPSDMD Kabupaten Siak
11	RICA NOVIANI, S.Sos Bengkalis, 04 November 1983	19831104 200901 2 002	P	Penata TK. I (III/d)	01 April 2020	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	31 Agustus 2023	-	15	11	- LPJ	06/2009	216	UNIVERSITAS LANCANG KUNING	ADMINISTRASI NEGARA	2007	S1	-	BKPSDMD Kabupaten Siak
12	RATU PURNAMA, SE Pontianak, 8 Mei 1985	19850508 200901 2 002	P	Penata TK. I (III/d)	01 April 2020	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan dan Umum	2 September 2024	-	15	11	- LPJ	2009	174	STIE PERSADA BUNDA	MANAJEMEN	2007	S1	1 DCTVR	BKPSDMD Kabupaten Siak
13	SUHENDE, ST Siak, 21 Mei 1984	19840521 201504 1 001	L	Penata TK. I (III/d)		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	31 Agustus 2023	-	9	8	- PELATIHAN DASAR	2017	1141	UIN SUSKA RIAU	TEKNIK INFORMATIKA	2008	S1	1 Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
14	ROSIDIN ZAHRI, SE Cilacap, 17 April 1981	19810417 200701 1 012	L	Penata (III/c)	01 April 2020	Penelaah Teknis Kebijakan Bidan Pengembangan	2 September 2024	-	17	11	- LPJ	2008	174	Universitas Lancang Kuning	MANAJEMEN	2014	S1	1 Dinas PU TARUKIM	BKPSDMD Kabupaten Siak
15	ZONA MARETIANA, S.Sos Pekanbaru, 29 Maret 1986	19860329 201001 2 013	P	Penata TK. I (III/d)	2022	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Juli 2021	-	14	11	- LPJ	2010		STISIP PERSADA BUNDA	ILMU KOMUNIKASI	2006	S1	1 DIPMPTSP KAB.SIAK	BKPSDMD Kabupaten Siak
16	DESI AGUSTINA, S.AP Siak Sri Indrapura, 26 Maret 1982	19820326 200901 2 001	P	Penata TK. I (III/d)	01 April 2023	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	31 Agustus 2023	-	15	11	- LPJ	07/2009	216	SMK PGRI UT	Sekretaris ADM	2000 2012	S1	1 Bagian Kepegawaian Sekda Kab.Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
17	WILDA HARYANI, SE Lirik, 28 Agustus 1979	19790828 201001 2 014	P	Penata TK. I (III/d)	01 April 2023	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	2 September 2024	-	14	11	- Diklat Pra Jabatan III	2011	216	UNIVERSITAS ANDALAS	AKUTANSI	2004	S1	1 Dinas PU 2 Kelurahan Kampung Rempak	BKPSDMD Kabupaten Siak
18	JON KENEDE, S.A.P Benayah, 19 Nopember 1985	19851119 200604 1 001	L	Penata TK. I (III/d)		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	31 Agustus 2023	-	18	8	- LPJ	2006	216	LAN STIA	MANAJEMEN SDM	2012	S1	1 Bagian Perekonomian Sekda Kab.Siak 2 Mahasiswa Tugas Belajar di STIA-LAN Bandung 3 Pelaksana BKPSDMD	BKPSDMD Kabupaten Siak
19	ULAN KUMALA SARI, SE Pekanbaru, 22 Juli 1989	19890722 201504 2 002	P	Penata (III/c)	01 April 2023	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	2 September 2024	-	9	8	- PELATIHAN DASAR	2017	1141	UNILAK	AKUNTANSI	2012	S1	-	BKPSDMD Kabupaten Siak
20	EKA NOFRIANTI, S.Sos, M.Si Padang, 29 November 1985	19851129 201212 2 002	P	Penata (III/c)	01 Oktober 2020	Penelaah Teknis Kebijakan Bidan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2 September 2024	-	12	0	- LPJ	2014	120	UIR	ADM. PUBLIK	2018	S2	1 Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama Setda Kab.Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
21	IRFAN, S.A.P Lalang Tanjung, 18 Juli 1984	19840718 201001 1 026	L	Penata Muda TK. I (III/b)		Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	2 September 2024		14	11				UNIVERSITAS TERBUKA	Administrasi Negara		S1		BKPSDMD Kabupaten Siak
22	NORMA SURI ILYASA, S.H. Kampar, 01-08-1987	19870801 201902 2 005	P	Penata Muda TK. I (III/b)	01 April 2023	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	2 September 2024	-	5	10	- PELATIHAN DASAR	2019	-	UIR	HUKUM	2009	S1	-	BKPSDMD Kabupaten Siak
23	RAHMO MUHAMMAD RIDWAN, S.E. Kampar, 14-11-1989	19891114 201902 1 001	L	Penata Muda TK. I (III/b)	01 April 2023	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	2 September 2024	-	5	10	- PELATIHAN DASAR	2019	-	UIN	AKUNTANSI	2012	S1	-	BKPSDMD Kabupaten Siak

24	HERVIZA YUNI, S.E Siak, 09-07-1987	19870907 201902 2 004	P	Penata Muda TK. I (III/b)	01 April 2023	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	2 September 2024	-	5	10	- PELATIHAN DASAR	2019	-	IPB	MANAJEMEN	2009	S1	1 Bagian Organisasi Setda Kab.Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
25	MURSALAM, S.A.P Bajaneegara, 29 Januari 1972	197201291 199907 1 001	L	Penata Muda (III/a)	01 April 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	2 September 2024	-	25	5	- LPJ	2001	85	SLTA	IPS		S1	1 SDN 067 UPTX Sei Bualan 2 S 2 SMPN 2 MEMPUKA	BKPSDMD Kabupaten Siak
26	ISHAK, S.A.P Dedap, 23 Juni 1976	19760623 200701 1 003	L	Penata Muda (III/a)	01 April 2022	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	2 September 2024	-	17	11	- LPJ	2008	174 20	MA	IPS		S1	1 SMP 2 SIAK 2 Bagian Ad. Kesra Setda Kab.Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
27	INDRA KURNIAWAN, S.A.P Tanah Merah, 30 Nopember 1983	19831130 200903 1 005	L	Penata Muda (III/a)	01 April 2022	Penelaah Teknis Kebijakan Bidan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2 September 2024	-	15	9	- LPJ	2011	174	UNIV. NEGERI PADANG	PENJASKES		S1	1 FU Pemkab INHIL 2 FU UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Bungaraya	BKPSDMD Kabupaten Siak
28	SUGIMAN DELI SERDANG, 20 Juli 1977	19770720 200901 1 002	L	Penata Muda (III/a)	01 April 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	2 September 2024	-	15	11	- LPJ	2010	177	SMA	JPA		S1	1 FU Dispersenbudpora 2 Sekdes Suak Lanjut	BKPSDMD Kabupaten Siak
29	ILHAM ZIKRI, S.A.P TTG. Pinang 28-09-1985	19850928 201404 1 001	L	Penata Muda (III/a)	01 Oktober 2023	Penelaah Teknis Kebijakan Bidan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2 September 2024		10	8	- LPJ	27/05/20 14	216	UNIVERSITAS TERBUKA	S1-ADMINISTRASI NEGARA	2021	S1	1. Unit Pelaksana Teknis RSUD Tarempa Kabupaten Kepulauan Meranti	BKPSDMD Kabupaten Siak
30	YULITA, S.AP Siak, 27 Juli 1985	19850727 201409 2 004	P	Penata Muda (III/a)	01 Oktober 2023	Penelaah Teknis Kebijakan Bidan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2 September 2024	-	10	3	- LPJ	2016	78				S1	1 UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Siak	BKPSDMD Kabupaten Siak
31	CHELVI MAYANA, S.Sos Banyuwangi, 27 Mei 1993	19930527 202012 2 014	P	Penata Muda (III/a)	01 Desember 2021	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	4 Januari 2021	-	4	0		-	-	UNIVERSITAS BRAUWIDAYA	SOSIOLOGI	2018	S1	-	BKPSDMD Kabupaten Siak
32	YULIARTI SIAK, 30-07-1985	19850730 201001 2 022	P	Pengatur Tk.I (II/d)	01 April 2022	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Administrasi Kepegawaian	2 September 2024	-	14	11	- LPJ	2010	177	SMU N 1 SIAK	JPA	2003	SLTA	1 TU smpn 1 Siak 2 FU Dinas Pasar, Kebersihan & Pertamanan	BKPSDMD Kabupaten Siak
33	EFZI RIZAL Siak, 11-09-1985	19850911 201212 1 001	L	Pengatur (II/c)	01 April 2017	Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Perencanaan dan Umum	2 September 2024	-	12	0	- LPJ	12/2014	120	SMU N 1 SIAK	IPS	2003	SLTA		BKPSDMD Kabupaten Siak
34	PERONISYA RIDA, A.Md SIAK, 22 Februari 1998	19980222 202203 2 006	P	Pengatur (II/c)	01 April 2022	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	2 September 2024	-	2	9	-	-	-	UNIVERSITAS RIAU	AKUTANSI	2018	D-III		BKPSDMD Kabupaten Siak
35	DONI HENDRIKO, A.Md Kampung Sawah, 04 Juni 1987	19870604 202203 1 003	L	Pengatur (II/c)	01 April 2022	Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	2 September 2024	-	2	9	-	-	-	UNIVERSITAS ANDALAS PADANG	AKUTANSI	2009	D-III		BKPSDMD Kabupaten Siak
36	SYAFRIADI	19820215 200701 1 007	L	Pengatur (II/c)		Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	2 September 2024	-	17	11	Diklat Prajab	2008	174	SMA	IPS	2007	SLTA		BKPSDMD Kabupaten Siak
37	DEVI ANDRIANI, S.Sos	198610102023212000	P	IX	01 Oktober 2023	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Administrasi Kepegawaian	01 Oktober 2023	-	1	3				Universitas Riau	Administrasi Niaga	2008	S1		BKPSDMD Kabupaten Siak
38	MUHAMMAD NAZIR, S.Sos	1198606102023211032	L	IX	01 Oktober 2023	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bidang Administrasi Kepegawaian	01 Oktober 2023	-	1	3					Administrasi Negara	2016	S1		BKPSDMD Kabupaten Siak
39	NURWAHYUNI, S.Sos	198809102023212051	P	IX	01 Oktober 2023	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bidang Administrasi Kepegawaian	01 Oktober 2023	-	1	3					Administrasi Negara	2014	S1		BKPSDMD Kabupaten Siak
40	RICKY ILHAM PUTRA, S.Sos	198909012024211000	L	IX	01 Februari 2024	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Bidang Administrasi Kepegawaian	31 Januari 2029	-	0	11				Universitas Lancang Kuning	Administrasi Negara	2014	S1		BKPSDMD Kabupaten Siak

2. 2. 2. ASSET MODAL

Adapun alat sarana dan prasarana yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana BKPSDMD Kabupaten Siak

Daftar aset akhir tahun 2024

A.	Tanah dan Bangunan	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor BKPSDMD	2462.83	M ²
B.	Alat-Alat Angkutan		
1	Kendaraan bermotor:		
	- Roda empat	7	unit
	- Roda dua	17	unit
C.	Peralatan Kantor		
1	-Penyemprot Tangan (Hand Spray)	4	unit
2	-Rak Besi	20	unit
3	-Meja Kerja	31	unit
4	-Filing Kabinet	24	unit
5	-Lcd Projektor/Infokus	4	unit
6	-Kursi	35	unit
7	-Laptop	23	unit
8	-Note Book	6	unit
9	-Tablet P.C	2	unit
10	-Printer	28	unit
11	-Lemari	25	unit
12	-Meja Komputer	14	unit
13	-Wireles	4	unit
14	-P.c Unit	31	unit
15	-TV	1	unit
16	-Proyektor Infocus	4	unit
17	-Rak Kertas	7	unit
18	-Dispenser	2	unit
19	-Hard disk External	5	unit
20	-Kulkas	2	unit
21	-Roliing Filling	1	unit
22	-Scanner	1	unit
23	-AC	19	unit
24	-Kipas Angin	2	unit
25	-Sofa/Kursi Tamu	6	unit
26	-Tabung Racun Api	4	unit
27	-Meja Kerja	64	unit
28	-Mesin Penghancur Kertas	2	unit
29	-Brangkas	1	unit
30	-Jaringan Internet	1	unit
31	-Megaphone	8	unit
32	-Mesin Pemetong Rumput	1	unit

2.3 KINERJA PELAYANAN

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Siak																		
No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Thn.2020	Target Kinerja														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021			2022			2023			2024			2025	2026	
				target	capaian	%	target	capaian	%	target	capaian	%	target	capaian	%			
1	2	3	4	5			6			7			8			9	10	11
	ASPEK PELAYANAN UMUM																	
	Penunjang Urusan																	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan																	
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	11.54	20	12.35	62%	20	21.94	110%	20	30.94	155%	20	22.17	111%	20	20	20
jumlah lama (jam pelajaran) pegawai mengikuti diklat teknis (peningkatan kompetensi) dibagi jumlah PNS yang mengikuti																		
3.2	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	16.88%	31.21%	27.64%	89%	45.55%	47.21%	104%	59.88%	67.14%	112%	74.21%	79.69%	107%	88.55%	100%	100%
jumlah ASN yg telah mengikuti tubel dan diklat teknis (peningkatan kompetensi) dibagi jumlah total ASN yang akan mengikuti diklat dikali 100%																		
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	77.80%	80.58%	78.23%	97%	80.71%	81.35%	101%	88.28%	55.33%	63%	93.84%	55.55%	59%	97.99%	100%	100.00%
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural (sesuai jabatan) dibagi total jabatan dikali 100%																		
3.4	Jumlah pejabat pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	30	34	27	79%	35	31	89%	35	33	94%	35	32	91%	35	35	35
3.5	Jumlah pejabat administrasi pada instansi pemerintah	%	598	653	664	102%	653	528	81%	653	504	77%	653	451	69%	653	653	653
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	%	3666	3692	3260	88%	3721	3251	87%	3750	3209	86%	3779	5845	155%	3808	3837	3837
Rata capaian kinerja				86.13%			95.16%			97.75%			98.76%					

Berdasarkan tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian, dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak telah melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawab dengan rata-rata capaian meningkat dan pada tahun akhir pelaksanaan dengan persentase sebesar 98.76%

Berdasarkan laporan capaian kinerja organisasi di aplikasi e-kinerja BKN, untuk capaian kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2024, dapat dirincikan bahwa dari jumlah pegawai 40 orang, terdapat 16 orang pegawai dengan predikat capaian kinerja sangat baik dan 24 orang dengan predikat capaian kinerja baik, sebagaimana terlihat pada tampilan screenshot capaian organisasi di aplikasi e-kinerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja Induk	Capaian Organisasi	Status	Statistik
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Istimewa	FINAL	Pegawai dinilai: 40 / 40 Sangat Baik : 16 Baik : 24 Butuh Perbaikan : 0 Kurang : 0 Sangat Kurang : 0

Penilaian kinerja pegawai tersebut juga mencakup monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara berkala setiap bulannya, setiap pegawai ASN memiliki tanggung jawab terhadap kinerjanya masing-masing berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai dan di Evaluasi Kinerja Pegawai setiap bulannya yang dinilai capaian kinerja sesuai target yang telah disetujui oleh pimpinan langsung, capaian kinerja pegawai akan mendukung capaian kinerja organisasi

Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan aplikasi e-kinerja

SASARAN KINERJA PEGAWAI						
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF						
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL						
PEMERINTAH KAB. SIAK			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024			
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	YANDINATA AHMAD, S.Kom	1	NAMA	NOFITRIZAL, SH	
2	NIP	198301222009031002	2	NIP	197311082002121004	
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	
4	JABATAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN UMUM	4	JABATAN	SEKRETARIS	
5	UNIT KERJA	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN UMUM	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT	
HASIL KERJA						
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA						
1	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran	Kuantitas	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen
2	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur		Tersusunnya laporan kinerja OPD	Kuantitas	Jumlah dokumen yang tersusun	1 laporan
3	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur		Tersusunnya dokumen Rencana Umum Pengadaan OPD	Kuantitas	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen
4	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur		Terlaksananya penataan barang milik daerah	Kuantitas	Jumlah laporan yang tersusun	2 laporan
5	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur		Terlaksananya penataan administrasi surat menyurat	Kuantitas	Jumlah laporan dokumen surat menyurat yang diarsipkan	1 laporan

Hasil Capaian Kinerja Pegawai berdasarkan aplikasi e-kinerja

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAK BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran	Kuantitas	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	Tersedianya DPA dan DPA Perubahan 2024 berdasarkan DPA dan DPA Perubahan 2024	Pimpinan: 🟢🟢
2	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur	Tersusunnya laporan kinerja OPD	Kuantitas	Jumlah dokumen yang tersusun	1 laporan	Tersedianya Laporan Kinerja OPD berdasarkan Laporan Kinerja OPD	Pimpinan: 🟢🟢
3	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur	Tersusunnya dokumen Rencana Umum Pengadaan OPD	Kuantitas	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	Tersedianya RUP dan RUP Perubahan 2024 berdasarkan RUP dan RUP Perubahan 2024	Pimpinan: 🟢🟢
4	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur	Terlaksananya penataan barang milik daerah	Kuantitas	Jumlah laporan yang tersusun	2 laporan	Tersedianya Lap brg habis pakai dan brg aset berdasarkan Daftar Persediaan barang dan daftar aset	Pimpinan: 🟢🟢
5	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu dan sesuai prosedur	Terlaksananya penataan administrasi surat menyurat	Kuantitas	Jumlah laporan dokumen surat menyurat yang diarsipkan	1 laporan	Tersedianya laporan adm surat menyurat berdasarkan Screenshot aplikasi srikandi	Pimpinan: 🟢🟢

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja per triwulan sekretariat

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM (ESELON III) TRIWULAN II
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : NORITRIZAL, SH
Jabatan : SEKRETARIS BKPSDMD
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
Jabatan Pimpinan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	sasaran/program/kegiatan				Target Kinerja Triwulan (akumulasi)				% Target Kinerja				Realisasi Kinerja Triwulan (akumulasi)				% Capaian Kinerja				Ket
	Urutan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,56%				97,56%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	41	41	41	41	41	100%	100%	100%	100%	40	40			97,56%	97,56%			
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100			100%					100%					0,00%				
	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	45			45					100%					0,00%				
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	28%	52%	76%	100%	82%	88%	94%	100%	81,22%				81,39%				
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	9	9			100,00%	100%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	2	2			100,00%	100%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	6	6			100,00%	100%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	450	120	115	115	100	27%	52%	78%	100%	115	232			25,56%	51,56%			
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Persen	100	100%				100%				100%				100%				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	17				100%				17				100,00%				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang unsur pemerintah daerah	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,88%				96,88%				

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	3	3			100,00%	100%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	Laporan	32	32	32	32	32	100%	100%	100%	100%	30	30			93,75%	100%			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persen	100	75%	85%	95%	100%	75%	85%	95%	100%	41,67%				41,67%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	1	1			100,00%	100%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit	8	8	8	8	8	100%	100%	100%	100%	2	6			25,00%	100%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96	23	30	30	13	24%	55%	86%	100%	51				0,00%	53,13%			

B. LAPORAN PELAKSANAAN

Raport telah dilaksanakan sesuai target.

C. EVALUASI PIMPINAN

- Pertahankan kinerja baik
- Koordinasi dgn Bidang & u ushn agar agar perubahan!

SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK

NORITRIZAL, SH
NIP. 19751108 200312 1 004

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK

H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
NIP. 19600705 199002 1 002

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja per triwulan Bidang ADM

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM (ESELON III) TRIWULAN I BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : RAHMAT KUSRIONO, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BKPSDMD
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
Jabatan Pimpinan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	sasaran/program/kegiatan				Target Kinerja Triwulan				% Target Kinerja				Realisasi Kinerja Triwulan (akumulasi)				% Capaian Kinerja				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian Pegawai ASN dan Informasi Kepegawaian	%	100	100%				100%												
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1				100%												
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1																	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi Pegawai ASN	%	100	77%	84%	92%	100%	77%	84%	92%	100%	76,83%				76,83%				
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	1				100%				1				100%				
	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1220	363	280	280	297	30%	53%	76%	100%	299				24,51%				
	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	1				100%				1				100%				

B. LAPORAN PELAKSANAAN

Sub kegiatan Pengadaan PNS dan PPPK : - Untuk Formasi 2023 sedang dalam proses pengusulan NIP PPPK dari BKN
- Untuk Formasi 2024 sedang dalam proses pengusulan rincian Formasi kebutuhan ASN 2024

Sub kegiatan kenaikan pangkat : - Kp. Periode Februari, total usulan 40 Bertas di ACC 36, Tms : 4
- Kp. Periode April, total usulan 323 bertas, di ACC 263 dan Tms : 60 bertas

Sub kegiatan pengelolaan mutasi : Telah dilaksanakan dua kali peneknhan pada bulan Januari dan Maret

Sub kegiatan Pengelolaan Promosi : Telah dilaksanakan pengelolaan Promosi pada bulan Januari

C. EVALUASI PIMPINAN

- Koordinasikan dgn BKN
- lengkapi Administrasi dan Dokumentasi kan !

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAHMAT KUSRIONO, SH
NIP : 89640804 201102 1 002

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK

H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
NIP : 19690705 199002 1 002

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja per triwulan Bidang PSDA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM (ESELON III) TRIWULAN IV BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

Nama Pejabat yang Melaporkan Kinerja : R. RAFILLA IRAWAN, S. S
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BKPSDMD
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
Jabatan Pimpinan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN

No	sasaran/program/kegiatan				Target Kinerja Triwulan (akumulasi)				% Target Kinerja				Realisasi Kinerja Triwulan (akumulasi)				% Capaian Kinerja				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	%	100	51%	72%	100%	100%	47%	56%	85%	100%	28.19%	70.92%	93.75%	95.69%	24.17%	58.24%	82.40%	95.69%	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	125	20	30	40	35	16%	40%	72%	100%	25	38	59	69	20.00%	50.40%	97.60%	100 %	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	3	3	3	3	75.00%	75.00%	75.00%	100 %	
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	3		1		2	33%			100%	0	1	2	2	0%	90.91%	90.91%	90.91%	
		Jumlah Peserta Pelatihan Orientasi PPPK	Orang	160				160				100%				-				-	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	11		9	2							9	2		0%	81.82%	100%	100 %	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	Orang	2		2								2			0%	100%		100 %	
	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	60	15	15	20	10	25%	50%	83%	100%	1	9	37	8	2%	17%	91%	91.67%	

B. LAPORAN PELAKSANAAN

- Terlaksananya kegiatan asessment pegawai fungsional dan administrasi sejumlah 25 orang di asessment center Polda Riau dan Pengembangan ASN di lingkungan Pemkab Siak.
- Terlaksananya pengembangan karir dalam jabatan Fungsional sebanyak 8 orang.
- Total Sub kegiatan kapasitas kinerja ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun anggaran 2024 terbanyak 191 orang.
- Total Sub kegiatan pengembangan karir dalam jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024 sebanyak 55 orang.
- Total Pengelolaan Pendidikan lanjutan sebanyak 3 orang.
- Total Sub koordinasi kerjasama diklat sebanyak 15 orang.

Faktor penghambat : Dukungan Anggaran tidak mencukupi

langkah perbaikan : meminta surat dukungan APBD guna kegiatan Anggaran

C. EVALUASI PIMPINAN

- Terima kasih Atas Kinerja Baiknya
- Survei Pak Sida selaku ketua TAPD terkait dukungan Anggaran

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK
R. RAFILLA IRAWAN, S. S
NIP. : 19781214 201001 1 002

Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK
H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
NIP. : 19660705 199002 1 002

Untuk tingkat kehadiran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi

kehadiran pegawai tahun 2024 mencapai 99.86%, adapun hasil pengukuran tingkat kehadiran pegawai aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi kehadiran pegawai akhir tahun 2024

Rekapitulasi Kehadiran Pegawai																										
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH																										
Tahun 2024																										
No	Nama Lengkap	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUS		SEPT		OKTO		NOVEM		DESEM		TOTAL
		HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	HADIR	TK	
1	H. ZULFIKRI, S.Sos, MM 198507011990021002 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
2	NOFFRIZAL, SH 197311082002121004 SEKRETARIS BADAN	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
3	MARFANIS, S.Sos 197303062002121004 KEPALA BIDANG PEMBAKHAAN	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
4	R. RAFLIA IRAWAN, S.S 1978121403001002 KEPALA BIDANG	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	99.58%
5	RAHMAT KUSURNO, SH 198408042011010002 KEPALA BIDANG ADMINSTRASI	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	99.58%
6	NANI PUTRI, S.Sos 197311020002120001 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
7	M. ASMAHA SYARIF, S.Sos 198008022008041007 Analisis Pengembangan Karir	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
8	FURY LESTARI, S.kom 198012122008010002 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
9	YANGNITA AHMAD, S.kom 198301122008031002 KEPALA SUBBAGIAN	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	93.75%	6.25%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	99.06%
10	ZONA MARETIANA, S.Sos 198003290301001003 KEPALA SUBBAGIAN	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	95.45%	4.55%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	98.79%
11	WILDA HARYANI, SE 197908280300100104 Penyusunan Rencana Promosi	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
12	DESI AGUSTINA, S.AP 198203282008010001 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
13	JOH KENEDI, S.A.P 198111102008041001 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
14	RATU PURNAMA, S.E 198008082008010002 Analisis Perencanaan, Evaluasi	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
15	RIKA NOVIANI, S.Sos 198101160300021002 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
16	ALTIKA NINGSIH, SE 199301102011040001 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
17	SUHENDRA, ST 198406212011040001 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	94.44%	5.56%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	99.54%
18	LEAN KUMALA SARI, SE 198007222011040002 Penata Laporan Keuangan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
19	ROSDIN ZUHR, S.E 198104172007010012 Analisis Diklat	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
20	EKA HENDRIANTI, S.Sos 1981112002122002 Analisis Pengembangan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
21	RAHNO MUHAMMAD RIHWAN, S.E 198911142019021001 NORMA SURI ILVISA, S.H	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
22	198708010300200205 ANALISA DATA DAN INFORMASI	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
23	HERVIZA YURI, S.E 198709072019022004 Analisis jabatan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
24	IRFAN, S.A.P 19840718030010010026 Penyusunan Rencana Mutasi	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	99.17%
25	CHELVI MAYYANA, S.Sos 199305272002120014 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
26	MUSALAKA, S.A.P 197201291998071001 Analisis Penegakan Integritas	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
27	SHAK, S.A.P 197906212007010003 Analisis Perencanaan Sumber	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
28	SUKIRMAN, S.A.P 197707222008010002 Penata Laporan Keuangan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
29	INDORA KURNIAWAN, S.A.P 198111020008010005 Analisis Pengembangan SDM	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
30	ILHAM ZIKRI, 198009282014041001 Analisis Diklat	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
31	YULITA, 198307272014092004 Analisis Pengembangan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
32	YULIASTI, 198307302010012022 Pengadministrasi Kepegawaian	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
33	EPZ RIDAL, 198009112012121001 Pengadministrasi Umum	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
34	FERONISYA RIDA, A.Md 198802222002030005 Pengelola Keuangan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	90.00%	10.00%	100.00%	0.00%	99.17%
35	DOINI HENDRIKO, A.Md 198706042002030003 Pengelola Keuangan	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	95.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	99.58%
36	SYAFRIADI, 198202152007011007 Pengadministrasi Kepegawaian	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
37	MURWAHYUNI, S.Sos 1980091020021210051 Analisis Sumber Daya Manusia	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.0.									

2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak adalah Terselenggaranya tata kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Profesional dengan indikator tujuan adalah Indeks profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara (IP ASN), indikator tersebut disesuaikan dari hasil penilaian oleh instansi pembina pengelola kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi

Kriteria pertama penilaian Indeks profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah kualifikasi Pendidikan, bobot penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kualifikasi	Riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS	25%	
	S-3		25
	S-2		20
	S-1/D-IV		15
	D-III		10
	SLTA/ D-II/ D-I/ Sederajat		5
	Dibawah SLTA		1

Kriteria kedua adalah kompetensi, bobot penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi	40%	
	Diklat Kepemimpinan (PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas)		15
	Sudah		15
	Belum		0
	Diklat Fungsional (PNS yang menduduki jabatan fungsional)		15
	Sudah		15
	Belum		0
	Diklat Teknis (PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional)		15
	Telah mencapai pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan		15
	Telah mencapai pendidikan dan pelatihan teknis dibawah 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan		Proporsional. Contoh: PNS mendapatkan 10 JP maka bobot yang didapatkan adalah $10/20 \times 15 = 7.5$

	Diklat Teknis (PNS yang menduduki jabatan pelaksana)		22.5
	Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir		22.5
	Telah mencapai pendidikan dan pelatihan teknis dibawah 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir		Proporsional Contoh: PNS mendapatkan 10 JP maka bobot yang didapatkan adalah $10/20 \times 22.5 = 11.25$
	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya (PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional) dalam 2 tahun terakhir		10
	Sudah		10
	Belum		0
	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya (PNS yang menduduki jabatan pelaksana) dalam 2 tahun terakhir		17.5
	Sudah		17.5
	Belum		0

Kriteria ketiga adalah kinerja, bobot penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kinerja	Riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30%	
	91 – 100		30
	76 – 90		25
	61 – 75		15
	51 – 60		5
	50 ke bawah		1

Kriteria keempat adalah disiplin, bobot penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Disiplin	Data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima	5%	
	Tidak Pernah		5
	Ringan		3
	Sedang		2
	Berat		1

Berdasarkan data hasil perhitungan dari BKN Kanreg XII untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Listing Nilai IP ASN (PNS) Tahun 2024 Instansi Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru

Kondisi : 10 Februari 2025

No	Nama Instansi	IP PNS 2023	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rata Nilai	Kategori	↑↓
1	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	79,73	5.178	20,63	29,27	25,25	5	80,15	sedang	0,42
2	Pemerintah Kota Sawahlunto	77,52	1.861	21,39	25,75	25,01	5	77,15	sedang	-0,37
3	Pemerintah Kab. Natuna	79,31	2.815	21	26,2	24,68	5	76,87	sedang	-2,44
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	76,32	2.599	20,96	25,72	24,76	5	76,44	sedang	0,12
5	Pemerintah Kab. Siak	74,78	5.156	21,18	25,64	24,37	5	76,19	sedang	1,41
6	Pemerintah Kota Solok	82,11	1.848	22,12	24,73	23,73	5	75,58	sedang	-6,53

Dari hasil tersebut, untuk capaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Siak mencapai nilai bobot sebesar 76.19, termasuk kategori sedang.

2.3.2Capaian Kinerja Sasaran

Untuk pengukuran capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, menggunakan formula perhitungan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029

Di tahun 2024, capaian kinerja sasaran tahunan berdasarkan perjanjian kinerja 2024 dapat dilihat berdasarkan pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai Aparatur Sipil Negara yang lulus mengikuti Pendidikan dan pelatihan	100%	100%	100%
Pengukuran berdasarkan Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang lulus mengikuti Pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dikali 100%					
1. Jumlah peserta diklatpim III yang lulus (berjumlah 11 orang) dibagi jumlah peserta diklatpim III (berjumlah 11 orang) dikali 100% = $11/11 \times 100\% = 100\%$ 2. Jumlah peserta diklatpim II yang lulus (berjumlah 2 orang) dibagi jumlah peserta diklatpim II (berjumlah 2 orang) dikali 100% = $2/2 \times 100\% = 100\%$ <i>Sumber data dari laporan tahunan 2024 Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur</i>					
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mematuhi aturan disiplin	100%	99.92%	99.92%
Pengukuran berdasarkan Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dikurangi jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan hukuman disiplin dibagi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dikali 100%					

Jumlah Pegawai ASN (7923 orang) dikurangi jumlah Pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin (6 orang) dibagi jumlah Pegawai ASN (7923 orang) dikali 100% $= (7923 - 6) / 7923 * 100\% = 99,92\%$

Sumber data dari laporan tahunan 2024 Bidang Pembinaan dan Pengawasan

3	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu sesuai prosedur	100%	91.72%	91.72%
----------	---	---	-------------	---------------	---------------

Pengukuran berdasarkan jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu sesuai prosedur dibagi Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diproses dikali 100%

1. Jumlah berkas pengajuan kenaikan gaji berkala yang memenuhi syarat dan terselesaikan sebanyak 871 berkas dibagi jumlah layanan yang diproses sebanyak 871 berkas dikali 100% = $871/871*100\%=100\%$

Sumber data dari laporan tahunan 2024 Bidang Pembinaan

2. Jumlah berkas pengajuan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat dan terselesaikan sebanyak 710 berkas dibagi jumlah layanan yang diproses sebanyak 851 dikali 100% = $710/851*100\%=83.43\%$

Sumber data dari laporan tahunan 2024 Bidang ADM Kepegawaian

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	$\geq 85\%$	Sangat Baik
2	70% sampai dengan $< 85\%$	Baik
3	55% sampai dengan $< 70\%$	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pengelompokan Capaian Kinerja Sasaran
BKPSDMD Kab. Siak Tahun 2024

No	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja sasaran
1	Sangat Baik	3	3
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang		
	Total	3	3

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran kinerja terhadap Tiga (3) sasaran strategis dan Tiga (3) indikator kinerja dengan capaian kinerja diatas 85% adalah termasuk kategori capaian **“Sangat Baik”**

Berikut uraian dari analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja Persentase Pegawai Aparatur Sipil Negara yang lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai jabatan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% termasuk kategori capaian **“Sangat Baik”**.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi dengan indicator kinerja kegiatan Terlaksananya pengembangan kompetensi Pegawai ASN dengan target yang 100%, secara teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Pegawai ASN telah tercapai dengan hasil kinerja 100%, dimana ada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diikuti sebanyak 11 orang peserta dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diikuti oleh 2 orang peserta dengan tingkat kelulusan mencapai 100% termasuk kategori capaian **“Sangat Baik”**, pencapaian kinerja sasaran ini meningkat 25% dari tahun sebelumnya

Sasaran 2 : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator Persentase Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mematuhi aturan disiplin, dimana terdapat Pegawai ASN yang mendapat hukuman disiplin sebanyak 6 orang dari jumlah Pegawai ASN Pemkab Siak 7923 orang, dengan persentase tingkat kedisiplinan Pegawai ASN secara keseluruhan sebesar 99.92% termasuk kategori capaian **“Sangat Baik”**, pencapaian kinerja sasaran ini meningkat 0.03% dari tahun sebelumnya

Sasaran 3 : Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian

Hasil capaian kinerja sasaran sebesar 91.72% termasuk kategori capaian **“Sangat Baik”**, keberhasilan capaian sasaran ini didukung dengan terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian berupa kegiatan pengelolaan kenaikan pangkat yang tepat waktu dan sesuai prosedur yang telah diproses sebanyak 851 berkas dan yang dapat terselesaikan 710 berkas, serta kegiatan pengelolaan kenaikan gaji berkala yang telah diproses sebanyak 871 berkas dan dapat di selesaikan tepat waktu sesuai perhitungan masa kenaikan gaji berkala, pencapaian kinerja sasaran ini menurun 2.9% dari tahun sebelumnya, dikarenakan pelayanan kenaikan pangkat satu atap tidak selesai tepat waktu karena terdapat berkas pengajuan kenaikan pangkat yang tidak bisa diproses karena tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 141 berkas dikarenakan beberapa factor antara lain penilaian angka kredit yang belum cukup untuk diproses

Adapun capaian realisasi kinerja utama berupa tujuan dan sasaran berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak 2021-2026 pada rentang waktu dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

REALISASI CAPAIAN KINERJA UTAMA BKPSDMD KAB. SIAK

Tahun 2024														
NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		2023		2024		2025		2026		Ket
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	Indeks profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara		%	60%	51.67%	65%	74.78%	70%	76.19%	75%		80%		Capaian kinerja telah melewati target tahunan
1	Meningkatnya kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai Aparatur Sipil Negara yang lulus mengikuti Pendidikan dan pelatihan	%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%		100%		seluruh kegiatan pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai ASN telah dilaksanakan dari 11 peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan 2 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mematuhi aturan disiplin	%	100%	99.91%	100%	99.89%	100%	99.92%	100%		100%		terdapat 6 PNS yang melanggar aturan disiplin dan telah diberikan sanksi berupa penjatuan hukuman disiplin
3	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan kepegawaian tepat waktu sesuai prosedur	%	100%	100%	100%	94.62%	100%	91.72%	100%		100%		Adanya penurunan capaian target karena kegiatan pelayanan kenaikan pangkat satu atap karena terdapat berkas pengajuan kenaikan pangkat yang tidak bisa diproses karena tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 141 berkas dikarenakan beberapa factor antara lain penilaian angka kredit yang belum cukup untuk diproses

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, merupakan penunjang urusan pemerintah daerah di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan di daerah Kabupaten Siak, dimana kelompok sasarannya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, kondisi keadaan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Keadaan ASN Pemkab Siak Menurut Golongan

JUMLAH ASN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2020-2024													
NO	GOLONGAN	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)												
1	GOLONGAN I	87	1	44	1	39	1	31	1	25	1	21	1
2	GOLONGAN II	751	682	569	517	560	477	471	405	403	296	353	197
3	GOLONGAN III	1255	2263	1272	2295	1267	2349	1324	2397	1290	2400	1267	2418
4	GOLONGAN IV	338	424	413	520	411	559	402	578	394	579	369	553
	JUMLAH	5801		5631		5663		5609		5388		5179	
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)					LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
2	GOLONGAN X							1		24	55	36	97
3	GOLONGAN IX					14	13	208	472	446	1314	514	1554
4	GOLONGAN VIII												
5	GOLONGAN VII						1	1	8	45	320	58	479
6	GOLONGAN V					4				4		6	
	JUMLAH	0		0		32		690		2208		2744	
	TOTAL JUMLAH	5801		5631		5695		6299		7596		7923	

Sumber Data : Subbid Data dan Informasi BKPSDMD

Keadaan ASN Pemkab Siak Menurut jabatan

JUMLAH JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK							
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	30	27	31	33	32
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1935	2,376	2327	2146	2046
3	Jumlah pemangku fungsional tertentu	Orang	3666	3,260	3,251	3,209	5,845
4	Jumlah jabatan pengawas	Orang	450	498	367	369	283
5	Jumlah jabatan PPPK	Orang	0	32	690	2,208	2,744

Sumber Data : Subbid Data dan Informasi BKPSDMD

Capaian Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Siak														
No	Aspek/Fokus/Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Thn.2020	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021		2022		2023		2024		2025	2026	
				target	capaian	target	capaian	target	capaian	target	capaian	target		
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
	ASPEK PELAYANAN UMUM													
	Penunjang Urusan													
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan													
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	11.54	20	12.35	20	21.94	20	30.94	20	22.17	20	20	20
3.2	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	16.88%	31.21%	27.64%	45.55%	47.21%	59.88%	67.14%	74.21%	79.69%	88.55%	100%	100%
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	77.80%	80.58%	78.23%	80.71%	81.35%	88.28%	55.33%	93.84%	55.55%	97.99%	100%	100.00%
3.4	Jumlah pejabat pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	%	30	34	27	35	31	35	33	35	32	35	35	35
3.5	Jumlah pejabat administrasi pada instansi pemerintah	%	598	653	664	653	528	653	504	653	451	653	653	653
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah	%	3666	3692	3260	3721	3251	3750	3209	3779	5845	3808	3837	3837
Rata capaian kinerja				86.13%		95.16%		97.75%		98.76%				

Keadaan ASN Pemkab Siak Menurut Golongan

JUMLAH ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK MENURUT JENIS KELAMIN																
NO	NAMA INSTANSI/OPD	2020			2021			2022			2023			2024		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14
1	SEKRETARIAT DAERAH	104	36	140	102	36	138	101	42	143	98	40	138	104	45	149
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	23	20	43	25	19	44	23	19	42	21	17	38	20	17	37
3	INSPEKTORAT	38	18	56	47	21	68	48	21	69	48	26	74	47	27	74
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	15	17	32	15	18	33	18	18	36	20	18	38	22	18	40
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	66	40	106	66	41	107	67	43	110	66	40	106	65	43	108
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	3	37	36	3	39	35	2	37	34	6	40	35	5	40
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	30	12	42	29	15	44	28	14	42	27	14	41	32	15	47
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										9	5	14	9	7	16
9	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	39	15	54	18	7	25	18	6	24	17	6	23	15	5	20
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	7	27	33	25	58	36	26	62	42	29	71	44	28	72
11	DINAS KESEHATAN	27	22	49	213	839	1052	215	874	1089	205	846	1051	301	1502	1803
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	209	820	1029	18	8	26	16	9	25	15	10	25	14	13	27
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16	7	23	22	8	30	23	8	31	23	6	29	24	5	29
14	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	20	8	28	13	5	18	13	3	16	11	3	14	11	3	14
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13	5	18	18	13	31	19	13	32	16	11	27	12	10	22
16	DINAS PARIWISATA	20	13	33	37	9	46	35	12	47	34	10	44	30	8	38
17	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	39	9	48	83	24	107	80	25	105	78	21	99	72	20	92
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	84	24	108	16	5	21	15	6	21	13	5	18	13	5	18
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17	5	22	11	20	31	9	23	32	9	22	31	8	20	28
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	20	32	9	16	25	8	15	23	7	19	26	7	19	26
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10	17	27	849	2028	2877	815	1978	2793	771	1911	2682	1174	3248	4422

22	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	875	2015	2890	39	8	47	36	9	45	35	8	43	32	8	40
23	DINAS PERHUBUNGAN	39	8	47	57	7	64	60	7	67	60	8	68	62	9	71
24	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	56	8	64	46	17	63	46	17	63	44	15	59	53	20	73
25	DINAS PERPUSTAKAAN	8	17	25	8	19	27	7	20	27	5	20	25	7	23	30
26	DINAS PERTANIAN	70	26	96	70	34	104	63	33	96	46	26	72	72	46	118
27	DINAS SOSIAL	14	11	25	13	13	26	15	13	28	14	12	26	15	11	26
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	29	6	35	23	5	28	22	5	27	17	5	22	15	5	20
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	139	14	153	135	14	149	130	15	145	127	15	142	120	15	135
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	5	12	8	5	13	8	5	13						
30	KECAMATAN BUNGARAYA	21	2	23	21	2	23	21	3	24	20	4	24	20	4	24
31	KECAMATAN DAYUN	17	4	21	16	4	20	13	6	19	10	6	16	10	5	15
32	KECAMATAN KANDIS	16	9	25	16	10	26	20	7	27	18	8	26	15	10	25
33	KECAMATAN KERINCI KANAN	11	3	14	10	3	13	11	3	14	10	4	14	8	3	11
34	KECAMATAN KOTO GASIB	10	6	16	9	6	15	10	7	17	10	8	18	11	6	17
35	KECAMATAN LUBUK DALAM	15	5	20	13	5	18	13	5	18	13	5	18	12	5	17
36	KECAMATAN MEMPURA	16	11	27	16	10	26	18	7	25	16	5	21	15	5	20
37	KECAMATAN MINAS	12	15	27	12	14	26	13	13	26	12	14	26	15	11	26
38	KECAMATAN PUSAKO	12	3	15	12	3	15	11	4	15	12	3	15	11	3	14
39	KECAMATAN SABAK AUH	15	4	19	14	4	18	15	4	19	13	4	17	12	4	16
40	KECAMATAN SIAK	22	17	39	21	17	38	22	15	37	21	17	38	16	19	35
41	KECAMATAN SUNGAI APIT	24	7	31	25	7	32	22	7	29	18	6	24	17	5	22
42	KECAMATAN SUNGAI MANDAU	18	4	22	16	4	20	14	4	18	12	4	16	13	4	17
43	KECAMATAN TUALANG	16	15	31	17	15	32	16	15	31	15	14	29	14	15	29
	TOTAL	2298	3333	5631	2277	3386	5663	2228	3381	5609	2112	3276	5388	2624	5299	7923

Sumber Data : Subbid Data dan Informasi BKPSDMD

REKAP DATA CAPAIAN KERJA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR												
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH												
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024												
NO	KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		DAFTAR TUNGGU SAAT INI
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PNS MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	30	31	40	95	80	136	90	161	130	191	
2	PNS MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL	30	0	20	25	20	43	50	72	50	55	
3	PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR CPNS	-	-	125	125	73	73	4	4	3	3	24
4	PEMBERIAN IZIN/TUGAS BELAJAR	1956	51	1905	80	1825	64	1761	155	1606	154	
5	PELAKSANAAN PELATIHAN PKN	1	1	-	-	1	1	2	2	2	2	14
6	PELAKSANAAN PELATIHAN PKA	-	-	13	13	10	10	20	20	11	11	48
7	PELAKSANAAN PELATIHAN PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180
8	ASESSMENT/UJI KOMPETENSI	2028	-	2028	23	2005	64	1941	127	1814	35	
9	ORIENTASI PPPK	-	-	-	-	-	-	2756	160	2596	-	2596

Sumber Data : Bidang PSDA BKPSDMD

REKAP DATA CAPAIAN KERJA BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1. <u>Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN</u>	<u>Jumlah hasil Pelaksanaan mutasi</u>	629 orang	113 orang <u>Jabatan Fungsional</u>	315 orang	122 orang	183 orang
	<u>Jumlah peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi</u>	19 orang	0 orang	32 orang	28 orang	13 orang
2. <u>Pengadaan seleksi Calon Pegawai ASN</u>	<u>Jumlah hasil pengadaan seleksi Pegawai ASN</u>	32 PPPK <u>teknis</u>	72 Calon PNS 648 PPPK guru 14 PPPK <u>teknis</u>	1025 PPPK guru 463 PPPK Kesehatan 29 PPPK <u>teknis</u>	185 PPPK guru 311 PPPK Kesehatan 49 PPPK <u>teknis</u>	47 PPPK guru 11 PPPK Kesehatan 591 PPPK <u>teknis</u> 18 CPNS
3. <u>Pengelolaan Kenaikan Pangkat</u>	<u>Proses Kenaikan Pangkat yang terselesaikan tepat waktu</u>	14310 <u>berkas</u>	1227 <u>berkas</u>	1227 <u>berkas</u>	995 <u>berkas</u>	710 <u>berkas</u>

Sumber Data : Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDMD

REKAP DATA CAPAIAN KERJA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APARATUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pembinaan disiplin Aparatur	<u>Jumlah ASN berkinerja baik</u>		5375 orang (96.86%)	5496 orang (87.25%)	5829 orang (76.73%)	5767 orang (72.78%)
	<u>Jumlah ASN berkinerja sangat baik</u>				414 (5.45%)	1771 (22.35%)
	<u>Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian kasus Pelanggaran Disiplin ASN</u>	11 orang	13 orang	2 orang	8 orang	6 orang

Sumber Data : Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur BKPSDMD

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dituntut untuk dapat menyelenggarakan digitalisasi Manajemen ASN guna menghasilkan Pegawai ASN yang profesional sehingga dapat Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan mendorong transparansi dan partisipasi untuk peningkatan pelayanan public yang berintegritas dan humanis

Permasalahan di unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Keterbatasan anggaran untuk pengadaan kebutuhan rutin kantor, sarana dan prasarana serta biaya pemeliharaan yang tinggi. Dengan anggaran terbatas, pelayanan jadi terganggu, pemeliharaan rutin kantor menjadi terhambat sehingga kondisi sarana dan prasarana bisa menurun lebih cepat hingga mengalami kerusakan.

2. Bidang Administrasi Kepegawaian

- Adanya perubahan aturan dan pola manajemen ASN sehingga diperlukan peningkatan kompetensi bagi SDM yang ada,
- Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam mengupdate data ASN sehingga menghambat proses digitalisasi pelayanan manajemen ASN

3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum bisa dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga kompetensi ASN masih rendah sesuai dengan kebutuhan organisasi

4. Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 adalah mengikat bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil, penerapan sanksi indisipliner harus diterapkan secara tegas dan nyata bagi setiap PNS yang melaksanakan tindakan indisipliner tanpa pandang bulu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Implementasi manajemen ASN belum optimal	Perencanaan kebutuhan ASN yang kurang optimal	Adanya ketidak sesuaian formasi antara usulan kebutuhan formasi dengan penetapan formasi
	Pengembangan Kompetensi ASN yang belum optimal	Peningkatan kompetensi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan
	Pengelolaan Kinerja ASN yang kurang optimal	Pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan ASN terhadap aturan kinerja masih kurang
	Pengembangan Karir ASN yang kurang optimal	Adanya perubahan aturan dan penyesuaian reformasi birokrasi
	Budaya Kerja yang masih rendah	Kurangnya Pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan ASN terhadap aturan disiplin ASN dan kondisi kesejahteraan pegawai ASN di daerah yang semakin menurun

Adapun permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan bidang kepegawaian kedepan antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas yang belum optimal dan kompetensi ASN yang masih rendah dalam pelaksanaan digitalisasi manajemen ASN
2. Kebutuhan anggaran yang meningkat untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang profesional.

Isu strategis manajemen ASN mencakup berbagai tantangan dan prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia, beberapa isu utama meliputi: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, budaya kerja, berikut adalah beberapa isu strategis manajemen ASN yang lebih rinci:

1. Perencanaan Kebutuhan:

- Perencanaan kebutuhan ASN yang tepat dan akurat sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik.
- Kekurangan perencanaan yang baik dapat menyebabkan masalah seperti kelebihan atau kekurangan pegawai, ketidakseimbangan kompetensi, dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Pengembangan Kompetensi:

- Peningkatan kompetensi ASN menjadi krusial dalam menghadapi tantangan global dan tuntutan perkembangan teknologi.

- Program pengembangan kompetensi harus dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM.

3. Pengelolaan Kinerja:

- Sistem penilaian kinerja yang efektif dan transparan diperlukan untuk mengukur produktivitas dan akuntabilitas ASN.
- Penilaian kinerja yang baik dapat menjadi dasar untuk memberikan penghargaan, pengembangan karier, serta sanksi jika diperlukan.

4. Budaya Kerja:

- Membangun budaya kerja yang positif, profesional, dan berintegritas sangat penting untuk meningkatkan kinerja ASN dan citra instansi.
- Peran pimpinan dalam memberikan contoh dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sangat signifikan.

5. Transformasi Jabatan:

- Transformasi jabatan dari struktural ke fungsional merupakan upaya untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan responsif.
- Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan spesialisasi dan profesionalisme ASN dalam bidang tertentu.

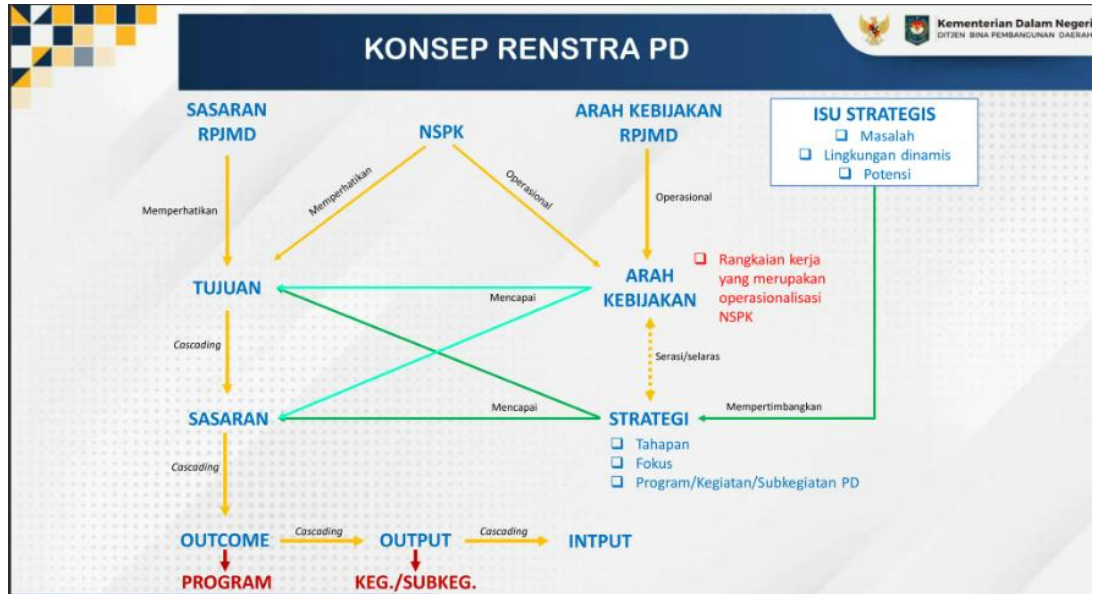
6. Digitalisasi Manajemen ASN:

- Digitalisasi manajemen ASN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan.
- Penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi ASN secara lebih baik.

Dari gambaran situasi dan kondisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis berdasarkan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian dan meningkatkan pelayanan yang prima.
2. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi

3. Pelaksanaan pengembangan karir Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui pola manajemen talenta berdasarkan sistem merit sesuai yang diamanatkan Undang-undang kepegawaian
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara sistematis dan berkala yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, integritas dan etos kerja sehingga mendongkrak kinerja birokrasi.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK

3.1 Tujuan

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak memegang peranan sentral sebagai pelaksana tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara dan dituntut untuk dapat menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, berkompeten, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Guna mewujudkan hal tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak memiliki tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu **“Terwujudnya Profesionalitas ASN”**, dengan indikator Indeks profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara dan dengan target capaian minimal diatas 78%

3.2 Sasaran

Sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, Aparatur Sipil Negara memiliki tugas dan peran yang penting untuk mendukung tugas pemerintahan dan ditambah dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, tugas dan peran tersebut harus senantiasa dijalankan secara profesional dan dengan integritas tinggi. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan manajemen ASN yang komprehensif serta berkesinambungan, maka dari itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak mempunyai sasaran yang kan dicapai adalah **Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian** dengan Indikator: Cakupan Administrasi Perangkat Daerah. Pegawai Aparatur Sipil Negara

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.03.0.00.0.00.03.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
- Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,30	78,50	78,85	79,20	79,65	80,15	81,00	
		Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian	Cakupan administrasi perangkat daerah (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
			Nilai SAKIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang (Nilai)	85,30	86,00	86,20	86,75	87,10	87,60	88,00	

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Guna memastikan tujuan dan sasaran mempunyai arah yang jelas berupa pedoman dan metode pelaksanaan, maka perlu disusun arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

Arah kebijakan dari tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak adalah **Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui penerapan Manajemen ASN**

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, ruang lingkup manajemen ASN minimal terdiri atas delapan proses, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian.

Berikut adalah langkah-langkah strategi manajemen ASN:

1. Perencanaan kebutuhan
Mengidentifikasi kebutuhan ASN yang relevan dengan tujuan organisasi dalam jangka pendek dan panjang.
Menggunakan analisis jabatan dan beban kerja untuk menentukan jumlah dan jenis kompetensi yang dibutuhkan.
2. Pengadaan ASN
Melakukan rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi untuk mendapatkan ASN terbaik.
Memastikan proses pengadaan transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
3. Pengembangan kompetensi
Menyediakan program pengembangan berkelanjutan, seperti pelatihan, seminar, dan workshop, untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian ASN.
Memastikan setiap ASN memiliki kompetensi yang relevan (manajerial, teknis, dan sosial kultural) untuk jabatan mereka.

Mendorong adaptasi terhadap transformasi digital untuk memastikan ASN memiliki kompetensi teknologi yang memadai.

4. Pengelolaan kinerja

Menerapkan sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan objektif.

Melibatkan ASN dalam penyusunan target kinerja (SKP) melalui dialog dengan pimpinan. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi kinerja secara berkala.

5. Manajemen talenta

Melakukan pemetaan talenta untuk mengidentifikasi ASN dengan potensi tinggi.

Mengembangkan talenta-talenta ini untuk disiapkan mengisi jabatan-jabatan strategis.

Melaksanakan manajemen talenta yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta.

6. Pemberian penghargaan dan pengakuan

Memberikan penghargaan dan pengakuan bagi ASN yang berprestasi dan berkinerja tinggi sebagai motivasi.

Menerapkan sistem reward dan punishment yang adil untuk mendorong peningkatan kinerja dan memberikan sanksi bagi ASN dengan kinerja buruk.

7. Penguatan budaya kerja dan citra institusi

Menumbuhkan nilai-nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Meningkatkan citra positif institusi di mata publik melalui pelayanan yang prima.

8. Pemberhentian

Melaksanakan proses pemberhentian sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk untuk pensiun, mutasi, atau alasan lainnya.

Memastikan proses ini dilakukan secara profesional dan sesuai aturan

9. Digitalisasi dan inovasi

Menggunakan teknologi digital untuk mengintegrasikan layanan kepegawaian (Smart ASN).

Mendorong eksperimen dan inovasi di tingkat individu maupun institusi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja.

Memanfaatkan platform digital untuk mempermudah manajemen ASN dan pengambilan keputusan.

Salah satu strategi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Manajemen ASN berbasis system merit dan penerapan Manajemen Talenta adalah Pembangunan Assessment Center ASN di Pemerintah Kabupaten Siak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penilaian kompetensi yang terstandar dan objektif. Metode Assessment Center yang digunakan dalam uji kompetensi ASN mencakup simulasi, wawancara berbasis kompetensi, dan tes psikologi. Proses ini dirancang untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosio-kultural pegawai ASN, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki kecakapan yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang mereka emban. Pembangunan Assessment Center juga bertujuan untuk mewujudkan ASN Pemerintah Kabupaten Siak yang kompeten dan profesional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pembangunan Assessment Center ASN di Pemernitah Kabupaten Siak memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Membantu menemukan potensi ASN: Assessment Center dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi tersembunyi yang dimiliki ASN, sehingga instansi dapat memberikan pengembangan yang tepat sasaran serta mendapatkan calon pejabat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan yang akan diisi
2. Meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas: Assessment Center membantu proses pengembangan pegawai menjadi lebih objektif dan akuntabel, karena penilaian didasarkan pada bukti dan data yang nyata, bukan hanya berdasarkan faktor subjektif seperti kedekatan atau senioritas serta memberikan gambaran tentang kesenjangan (gap) kompetensi dan kebutuhan pengembangan pegawai yang dibutuhkan (pelatihan, rotasi, monitoring, dan lain-lain) sehingga diperoleh kader potensial untuk pimpinan ke depan
3. Membangun budaya meritokrasi: Assessment Center dapat membantu membangun budaya meritokrasi di instansi pemerintahan, di mana pengembangan pegawai didasarkan pada kompetensi dan prestasi, bukan atas dasar kedekatan atau faktor lainnya

Pada sasaran **Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak memiliki Arah kebijakan dan strategi antara lain sebagai berikut:

- **Pemanfaatan teknologi informasi**

Mengelola database kepegawaian secara sistematis dan berkelanjutan serta mengintegrasikan kedalam sistem informasi manajemen ASN yang akuntabel, terintegrasi untuk mempermudah proses rekrutmen, pengelolaan, dan pemantauan kinerja ASN serta pembaruan data kepegawaian secara berkala

- **Peningkatan kompetensi SDM**

Melaksanakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan SDM dalam mengelola Manajemen ASN

- **Penyederhanaan proses dan prosedur**

Menyusun dan memutakhirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sederhana, dan mudah diakses oleh seluruh pegawai.

Menerapkan konsep pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk meminimalkan birokrasi dan mempersingkat alur layanan. Penyederhanaan prosedur,

- **Manajemen Talenta**

Mengelola database ASN secara terencana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memetakan, mengembangkan, dan menempatkan talenta terbaik terutama pada jabatan strategis

- **Peningkatan transparansi dan akuntabilitas**

Memastikan setiap proses administrasi kepegawaian dapat dilacak (tracking) dan diawasi dengan mudah oleh pegawai dan pimpinan.

Menyediakan saluran umpan balik dan pengaduan yang efektif untuk menampung masukan, saran, serta keluhan pegawai

- **Penghargaan**

Mengintegrasikan sistem e-kinerja dengan mekanisme tambahan penghasilan (TPP/Tukin) untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja ASN.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang direncanakan sesuai dengan pemutakhiran Permendagri 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut:

4.1 Uraian Program

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak mempunyai 2 (Dua) program yaitu :

I. Proram Kepegawaian Daerah

Program ini merupakan program utama dalam menentukan keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak

II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini sebagai program pendukung kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.307.581.389,83		8.544.027.827,41		8.787.803.132,96		9.038.945.068,91		9.297.637.441,57	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.047.503.379,33		6.219.624.549,72		6.397.080.769,14		6.579.899.526,10		6.768.214.623,64	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	6.047.503.379,33	100	6.219.624.549,72	100	6.397.080.769,14	100	6.579.899.526,10	100	6.768.214.623,64	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.260.078.010,50		2.324.403.277,69		2.390.722.363,82		2.459.045.542,81		2.529.422.817,93	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	100	100	640.019.503,00	100	658.235.434,00	100	677.015.984,00	100	696.364.063,00	100	716.293.830,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
TOTAL KESELURUHAN					8307581389.83		8544027827.41		8787803132.96		9038945068.91		9297637441.57	

4.2 Uraian Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak mempunyai beberapa kegiatan utama sebagai penentu dalam keberhasilan program Kepegawaian Daerah, kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN dan pengelolaan data kepegawaian serta adajuga termasuk salah satunya mengakomodir kegiatan fasilitasi profesi ASN
2. Mutasi dan Promosi ASN
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan mutase, promosi dan kenaikan pangkat ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis, diklat dasar, structural dan fungsional serta fasilitasi ASN mengikuti tugas belajar dan penyesuaian ijazah
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan pembinaan disiplin ASN, evaluasi kinerja, fasilitasi proses perceraian dan penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN dan proses administrasi pelayanan pemberian tanda jasa ASN

Dan beberapa kegiatan pendukung guna keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.03.0.00.0.00.03.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
- Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Profesionalitas ASN				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
		Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian			Cakupan administrasi perangkat daerah (Persentase)		
					Nilai SAKIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang (Nilai)		
		Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Cakupan Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Cakupan Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian Pegawai ASN dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	
					Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi Pegawai ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
					Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan gaji dan tunjangan ASN

II. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistik kantor

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan logistik kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, barang cetakan dan penggandaan, rapat koordinasi dan konsultasi

III. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan

2. Pengadaan mebel

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan

3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan

4. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan

5. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan kendaraan dinas operasional/lapangan kantor, mebel kantor, peralatan mesin lainnya kebutuhan kantor, pengadaan Gedung kantor, sarana dan prasarana kebutuhan Gedung kantor

IV. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan subkegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa listrik, air dan komunikasi jaringan internet, jasa layanan umum kantor

V. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
5. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan dinas jabatan, biaya pemeliharaan, BBM dan pajak kendaraan dinas operasional, biaya pemeliharaan peralatan mesin kantor, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya

VI. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaaan PNS dan PPPK
3. Fasilitasi lembaga profesi ASN
4. Pengelolaan data kepegawaian

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir penyusunan rencana kebutuhan ASN, fasilitasi pengadaan ASN, fasilitasi profesi ASN, pengelolaan data ASN

VII. Mutasi dan Promosi ASN dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Mutasi ASN
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Pengelolaan Promosi ASN

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Mutasi, Promosi dan kenaikan pangkat ASN

VIII. Pengembangan Kompetensi ASN dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
4. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis, diklat dasar, structural dan fungsional serta fasilitasi ASN mengikuti tugas belajar dan penyesuaian ijazah

IX. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
3. Pembinaan Disiplin ASN
4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan pembinaan disiplin ASN, evaluasi kinerja, fasilitasi proses perceraian dan penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN dan proses administrasi pelayanan pemberian tanda jasa ASN

Sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN				8.307.581.389,83		8.544.027.827,41		8.787.803.132,96		9.038.945.068,91		9.297.637.441,57		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.047.503.379,33		6.219.624.549,72		6.397.080.769,14		6.579.899.526,10		6.768.214.623,64		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	6.047.503.379,33	100	6.219.624.549,72	100	6.397.080.769,14	100	6.579.899.526,10	100	6.768.214.623,64	5.03.0.00.0.00.03.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.342.422.979,33		5.547.988.092,72		5.559.181.097,14		5.660.392.526,10		6.025.721.603,64		
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	64	5.342.422.979,33	64	5.547.988.092,72	64	5.559.181.097,14	64	5.660.392.526,10	63	6.025.721.603,64		
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.342.422.979,33		5.547.988.092,72		5.559.181.097,14		5.660.392.526,10		6.025.721.603,64		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	64	5.342.422.979,33	64	5.547.988.092,72	64	5.559.181.097,14	64	5.660.392.526,10	63	6.025.721.603,64		
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		550.000,00		450.000,00		2.000.000,00		450.000,00		
Cakupan Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	0	550.000,00	1	450.000,00	1	2.000.000,00	0	450.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		25		25		25		0			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		1			
5.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		150.000,00		1.500.000,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	150.000,00	1	1.500.000,00	0	0,00		
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		500.000,00		0,00		0,00		450.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	450.000,00		
5.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		50.000,00		300.000,00		500.000,00		0,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	25	50.000,00	25	300.000,00	25	500.000,00	0	0,00		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				137.942.400,00		72.898.457,00		245.961.672,00		352.519.000,00		197.555.020,00		
Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	137.942.400,00	5	72.898.457,00	5	245.961.672,00	5	352.519.000,00	5	197.555.020,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	198	247		247		240		240		230			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9					
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.016.000,00		16.516.000,00		194.860.000,00		155.160.000,00		135.160.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	26.016.000,00	9	16.516.000,00	9	194.860.000,00	9	155.160.000,00	9	135.160.000,00		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		514.607,00		14.672,00		8.536.800,00		18.672.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	3	0,00	5	514.607,00	5	14.672,00	5	8.536.800,00	5	18.672.000,00		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				72.222.000,00		7.822.200,00		8.222.200,00		85.822.200,00		858.220,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	72.222.000,00	2	7.822.200,00	2	8.222.200,00	2	85.822.200,00	2	858.220,00		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.704.400,00		48.045.650,00		42.864.800,00		103.000.000,00		42.864.800,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	198	247	39.704.400,00	247	48.045.650,00	240	42.864.800,00	240	103.000.000,00	230	42.864.800,00		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.400.000,00		33.200.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		
Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	2.400.000,00	1	33.200.000,00	4	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20		21		0		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		20		50		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		4		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		900.000,00		15.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	900.000,00	4	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				2.400.000,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	2.400.000,00	21	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		2.300.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	4	2.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		2.000.000,00		5.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	20	2.000.000,00	50	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				537.388.000,00		537.388.000,00		537.388.000,00		537.388.000,00		537.388.000,00		
Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	28	28	537.388.000,00	28	537.388.000,00	28	537.388.000,00	28	537.388.000,00	28	537.388.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				169.050.000,00		169.050.000,00		169.050.000,00		169.050.000,00		169.050.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				368.338.000,00		368.338.000,00		368.338.000,00		368.338.000,00		368.338.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	28	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.350.000,00		27.600.000,00		29.100.000,00		27.600.000,00		7.100.000,00		
Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	27.350.000,00	1	27.600.000,00	0	29.100.000,00	1	27.600.000,00	0	7.100.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8		8		8		8					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	96		96		96		96					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.100.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00		
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.500.000,00		18.500.000,00		20.500.000,00		18.500.000,00		2.050.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	18.500.000,00	8	18.500.000,00	8	20.500.000,00	8	18.500.000,00	8	2.050.000,00		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		450.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	96	4.500.000,00	96	4.000.000,00	96	4.000.000,00	96	4.000.000,00	96	450.000,00		
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	250.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		500.000,00		0,00		500.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.260.078.010,50		2.324.403.277,69		2.390.722.363,82		2.459.045.542,81		2.529.422.817,93		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31	5.03.0.00.0.00.03.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				540.019.502,50		555.389.281,23		571.235.459,94		587.560.493,27		604.376.329,31		
Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian Pegawai ASN dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	0	1	540.019.502,50	1	555.389.281,23	1	571.235.459,94	1	587.560.493,27	1	604.376.329,31		
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1				1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1					
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	0	1	135.004.875,00	1	138.847.320,00	1	142.808.864,00	1	146.890.123,00	1	151.094.082,00		
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				135.004.877,50		138.847.321,23		142.808.867,94		146.890.124,27		151.094.083,31		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1	135.004.877,50	1	138.847.321,23	1	142.808.867,94	1	146.890.124,27	1	151.094.083,31		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	135.004.875,00	1	138.847.320,00	1	142.808.864,00	1	146.890.123,00	1	151.094.082,00		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0	1	135.004.875,00	1	138.847.320,00	1	142.808.864,00	1	146.890.123,00	1	151.094.082,00		
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31		
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				540.019.502,50		555.389.281,23		571.235.459,94		587.560.493,27		604.376.329,31		
Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	0	15	540.019.502,50	15	555.389.281,23	15	571.235.459,94	15	587.560.493,27	15	604.376.329,31		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	10	10		9		8		7		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	8.536		8.536		8.536		8.536		8.536			
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.801	8.536		8.536		8.536		8.536		8.536			
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	262	512		879		762		573		756			
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	8.536	108.003.900,00	8.536	111.077.856,00	8.536	114.247.091,00	8.536	117.512.098,00	8.536	120.875.265,00		
5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	262	512	108.003.900,00	879	111.077.856,00	762	114.247.091,00	573	117.512.098,00	756	120.875.265,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				108.003.902,50		111.077.857,23		114.247.095,94		117.512.101,27		120.875.269,31		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.801	8.536	108.003.902,50	8.536	111.077.857,23	8.536	114.247.095,94	8.536	117.512.101,27	8.536	120.875.269,31		
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	10	10	108.003.900,00	9	111.077.856,00	8	114.247.091,00	7	117.512.098,00	6	120.875.265,00		
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	0	15	108.003.900,00	15	111.077.856,00	15	114.247.091,00	15	117.512.098,00	15	120.875.265,00		
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	100	640.019.503,00	100	658.235.434,00	100	677.015.984,00	100	696.364.063,00	100	716.293.830,00		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				640.019.503,00		658.235.434,00		677.015.984,00		696.364.063,00		716.293.830,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	60	50	640.019.503,00	50	658.235.434,00	50	677.015.984,00	50	696.364.063,00	50	716.293.830,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	2	5		5		5		5		5			
	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	90	120		120		120		120		120			
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	122	2		2		107		2		107			
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	90	120	135.004.875,00	120	138.847.320,00	120	142.808.864,00	120	146.890.123,00	120	151.094.082,00		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	122	2	135.004.875,00	2	138.847.320,00	107	142.808.864,00	2	146.890.123,00	107	151.094.082,00		
5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				235.004.878,00		241.693.474,00		248.589.392,00		255.693.694,00		263.011.584,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	2	5	235.004.878,00	5	241.693.474,00	5	248.589.392,00	5	255.693.694,00	5	263.011.584,00		
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	60	50	135.004.875,00	50	138.847.320,00	50	142.808.864,00	50	146.890.123,00	50	151.094.082,00		
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				540.019.502,50		555.389.281,23		571.235.459,94		587.560.493,27		604.376.329,31		
Terlaksananya Mutasi dan Promosi Pegawai ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.200	850	540.019.502,50	850	555.389.281,23	850	571.235.459,94	870	587.560.493,27	870	604.376.329,31		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				180.006.000,00		185.129.760,00		190.411.819,00		195.853.497,00		201.458.776,00		
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1	180.006.000,00	1	185.129.760,00	1	190.411.819,00	1	195.853.497,00	1	201.458.776,00		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				180.006.501,00		185.129.760,00		190.411.819,00		195.853.497,00		201.458.776,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.200	850	180.006.501,00	850	185.129.760,00	850	190.411.819,00	870	195.853.497,00	870	201.458.776,00		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				180.007.001,50		185.129.761,23		190.411.821,94		195.853.499,27		201.458.777,31		
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	1	180.007.001,50	1	185.129.761,23	1	190.411.821,94	1	195.853.499,27	1	201.458.777,31		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.307.581.389,83		8.544.027.827,41		8.787.803.132,96		9.038.945.068,91		9.297.637.441,57			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.047.503.379,33		6.219.624.549,72		6.397.080.769,14		6.579.899.526,10		6.768.214.623,64			
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	6.047.503.379,33	100	6.219.624.549,72	100	6.397.080.769,14	100	6.579.899.526,10	100	6.768.214.623,64	5.03.0.00.0.00.03.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.342.422.979,33		5.547.988.092,72		5.559.181.097,14		5.660.392.526,10		6.025.721.603,64			
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	61	64	5.342.422.979,33	64	5.547.988.092,72	64	5.559.181.097,14	64	5.660.392.526,10	63	6.025.721.603,64			
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.342.422.979,33		5.547.988.092,72		5.559.181.097,14		5.660.392.526,10		6.025.721.603,64		KAB. SIAK	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	61	64	5.342.422.979,33	64	5.547.988.092,72	64	5.559.181.097,14	64	5.660.392.526,10	63	6.025.721.603,64			
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00		550.000,00		450.000,00		2.000.000,00		450.000,00			
Cakupan Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0,00	0	550.000,00	0	450.000,00	0	2.000.000,00	1	450.000,00			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0		0		1		1		0				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0		25		25		25		0				
5.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0,00		0,00		150.000,00		1.500.000,00		0,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	1	150.000,00	1	1.500.000,00	0	0,00			
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		500.000,00		0,00		0,00		450.000,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0,00	0	500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	450.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		50.000,00		300.000,00		500.000,00		0,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0,00	25	50.000,00	25	300.000,00	25	500.000,00	0	0,00			
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					137.942.400,00		72.898.457,00		245.961.672,00		352.519.000,00		197.555.020,00			
Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	9	137.942.400,00	9	72.898.457,00	9	245.961.672,00	9	352.519.000,00	9	197.555.020,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	3		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	198	90	247		247		240		240		230				
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					26.016.000,00		16.516.000,00		194.860.000,00		155.160.000,00		135.160.000,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	9	26.016.000,00	9	16.516.000,00	9	194.860.000,00	9	155.160.000,00	9	135.160.000,00			
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0,00		514.607,00		14.672,00		8.536.800,00		18.672.000,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	3	0,00	5	514.607,00	5	14.672,00	5	8.536.800,00	5	18.672.000,00			
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					72.222.000,00		7.822.200,00		8.222.200,00		85.822.200,00		858.220,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2	72.222.000,00	2	7.822.200,00	2	8.222.200,00	2	85.822.200,00	2	858.220,00			
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					39.704.400,00		48.045.650,00		42.864.800,00		103.000.000,00		42.864.800,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	198	90	247	39.704.400,00	247	48.045.650,00	240	42.864.800,00	240	103.000.000,00	230	42.864.800,00			
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.400.000,00		33.200.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00			
Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2.400.000,00	4	33.200.000,00	0	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0		20		50		0		0				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		1		4		0		0				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0		1		0		0				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0		1		0		0		0				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	20		21		0		0		0				
5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		900.000,00		15.000.000,00		0,00		0,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	900.000,00	4	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00			
5.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00			
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					2.400.000,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	20	2.400.000,00	21	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		2.300.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	4	2.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
5.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		2.000.000,00		5.000.000,00		0,00		0,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	20	2.000.000,00	50	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					537.388.000,00		537.388.000,00		537.388.000,00		537.388.000,00		537.388.000,00			
Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	537.388.000,00	3	537.388.000,00	3	537.388.000,00	3	537.388.000,00	3	537.388.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	28	28	28				28		28		28				
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					169.050.000,00		169.050.000,00		169.050.000,00		169.050.000,00		169.050.000,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00	3	169.050.000,00			
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					368.338.000,00		368.338.000,00		368.338.000,00		368.338.000,00		368.338.000,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	28	28	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00	28	368.338.000,00			
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					27.350.000,00		27.600.000,00		29.100.000,00		27.600.000,00		7.100.000,00			
Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1	27.350.000,00	1	27.600.000,00	1	29.100.000,00	1	27.600.000,00	1	7.100.000,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	8				8		8		8				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	60	96				96		96		96				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0				1		0		0				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1				1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4.100.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		4.100.000,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00	1	4.100.000,00			
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					18.500.000,00		18.500.000,00		20.500.000,00		18.500.000,00		2.050.000,00		KAB. SIAK	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	8	18.500.000,00	8	18.500.000,00	8	20.500.000,00	8	18.500.000,00	8	2.050.000,00			
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		450.000,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	60	96	4.500.000,00	96	4.000.000,00	96	4.000.000,00	96	4.000.000,00	96	450.000,00			
5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					250.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1	250.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00			
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		500.000,00		0,00		500.000,00		0,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00	1	500.000,00	0	0,00			
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.260.078.010,50		2.324.403.277,69		2.390.722.363,82		2.459.045.542,81		2.529.422.817,93			
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31	5.03.0.00.0.00.03.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					540.019.502,50		555.389.281,23		571.235.459,94		587.560.493,27		604.376.329,31			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian Pegawai ASN dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	1	540.019.502,50	1	555.389.281,23	1	571.235.459,94	1	587.560.493,27	1	604.376.329,31			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	0	0	1	135.004.875,00	1	138.847.320,00	1	142.808.864,00	1	146.890.123,00	1	151.094.082,00			
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					135.004.877,50		138.847.321,23		142.808.867,94		146.890.124,27		151.094.083,31		KAB. SIAK	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1	1	135.004.877,50	1	138.847.321,23	1	142.808.867,94	1	146.890.124,27	1	151.094.083,31			
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		KAB. SIAK	
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	1	135.004.875,00	1	138.847.320,00	1	142.808.864,00	1	146.890.123,00	1	151.094.082,00			
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian					135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		KAB. SIAK	
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0	0	1	135.004.875,00	1	138.847.320,00	1	142.808.864,00	1	146.890.123,00	1	151.094.082,00			
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31			
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					540.019.502,50		555.389.281,23		571.235.459,94		587.560.493,27		604.376.329,31			
Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	10	10	10	540.019.502,50	9	555.389.281,23	8	571.235.459,94	7	587.560.493,27	6	604.376.329,31			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	262	400	512		879		762		573		756				
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	0	15	15		15		15		15						
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	7.508	8.536		8.536		8.536		8.536						
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.801	7.508	8.536		8.536		8.536		8.536						
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	7.508	8.536	108.003.900,00	8.536	111.077.856,00	8.536	114.247.091,00	8.536	117.512.098,00	8.536	120.875.265,00			
5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai					108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	262	400	512	108.003.900,00	879	111.077.856,00	762	114.247.091,00	573	117.512.098,00	756	120.875.265,00			
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN					108.003.902,50		111.077.857,23		114.247.095,94		117.512.101,27		120.875.269,31		KAB. SIAK	
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.801	7.508	8.536	108.003.902,50	8.536	111.077.857,23	8.536	114.247.095,94	8.536	117.512.101,27	8.536	120.875.269,31			
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	10	10	10	108.003.900,00	9	111.077.856,00	8	114.247.091,00	7	117.512.098,00	6	120.875.265,00			
5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					108.003.900,00		111.077.856,00		114.247.091,00		117.512.098,00		120.875.265,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	0	15	15	108.003.900,00	15	111.077.856,00	15	114.247.091,00	15	117.512.098,00	15	120.875.265,00			
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	100	100	640.019.503,00	100	658.235.434,00	100	677.015.984,00	100	696.364.063,00	100	716.293.830,00			
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN					640.019.503,00		658.235.434,00		677.015.984,00		696.364.063,00		716.293.830,00			
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	60	50	50	640.019.503,00	50	658.235.434,00	50	677.015.984,00	50	696.364.063,00	50	716.293.830,00			
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	122	122	2		2		107		2		107				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	90	100	120		120		120		120		120				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	2	3	5		5		5		5						
5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00			KAB. SIAK
Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	90	100	120	135.004.875,00	120	138.847.320,00	120	142.808.864,00	120	146.890.123,00	120	151.094.082,00			
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	122	122	2	135.004.875,00	2	138.847.320,00	107	142.808.864,00	2	146.890.123,00	107	151.094.082,00			
5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat					235.004.878,00		241.693.474,00		248.589.392,00		255.693.694,00		263.011.584,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	2	3	5	235.004.878,00	5	241.693.474,00	5	248.589.392,00	5	255.693.694,00	5	263.011.584,00			
5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					135.004.875,00		138.847.320,00		142.808.864,00		146.890.123,00		151.094.082,00		KAB. SIAK	
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	60	50	50	135.004.875,00	50	138.847.320,00	50	142.808.864,00	50	146.890.123,00	50	151.094.082,00			
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	540.019.502,50	100	555.389.281,23	100	571.235.459,94	100	587.560.493,27	100	604.376.329,31			
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN					540.019.502,50		555.389.281,23		571.235.459,94		587.560.493,27		604.376.329,31			
Terlaksananya Mutasi dan Promosi Pegawai ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.200	1.100	850	540.019.502,50	850	555.389.281,23	850	571.235.459,94	870	587.560.493,27	870	604.376.329,31			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN					180.006.000,00		185.129.760,00		190.411.819,00		195.853.497,00		201.458.776,00		KAB. SIAK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	1	1	180.006.000,00	1	185.129.760,00	1	190.411.819,00	1	195.853.497,00	1	201.458.776,00			
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					180.006.501,00		185.129.760,00		190.411.819,00		195.853.497,00		201.458.776,00		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.200	1.100	850	180.006.501,00	850	185.129.760,00	850	190.411.819,00	870	195.853.497,00	870	201.458.776,00			
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN					180.007.001,50		185.129.761,23		190.411.821,94		195.853.499,27		201.458.777,31		KAB. SIAK	
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	1	1	180.007.001,50	1	185.129.761,23	1	190.411.821,94	1	195.853.499,27	1	201.458.777,31			

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.03.0.00.0.00.03.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,30	78,50	78,85	79,20	79,65	80,15	81,00	
2	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- I. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaaan PNS dan PPPK
 3. Fasilitasi lembaga profesi ASN
 4. Pengelolaan data kepegawaian

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir penyusunan rencana kebutuhan ASN, fasilitasi pengadaan ASN, fasilitasi profesi ASN, pengelolaan data ASN

- II. Mutasi dan Promosi ASN dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Mutasi ASN
 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 3. Pengelolaan Promosi ASN

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Mutasi, Promosi dan kenaikan pangkat ASN

- III. Pengembangan Kompetensi ASN dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 3. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
 4. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis, diklat dasar, structural dan fungsional serta fasilitasi ASN mengikuti tugas belajar dan penyesuaian ijazah

IV. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
3. Pembinaan Disiplin ASN
4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan pembinaan disiplin ASN, evaluasi kinerja, fasilitasi proses perceraian dan penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN dan proses administrasi pelayanan pemberian tanda jasa ASN

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.03.0.00.0.00.03.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
			5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
			5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
			5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
			5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			5.03.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	
			5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
			5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	
			5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			5.03.02.2.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) telah tercapai, Indikator Kinerja Utama ini sangat penting karena menjadi cerminan dari visi dan misi yang memungkinkan kita untuk mengukur kemajuan secara obyektif dan memastikan bahwa setiap program serta sumber daya yang kita gunakan benar benar berkontribusi pada pencapaian. Target Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.03.0.00.0.00.03.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
2.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,30	78,50	78,85	79,20	79,65	80,15	81,00	
3.	Nilai SAKIP PD Pengampu Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang	Nilai	85,30	86,00	86,20	86,75	87,10	87,60	88,00	

4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja kunci adalah alat yang esensial bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Siak. Keberadaannya bukan sekedar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk memastikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dapat menjalankan perannya secara efektif dan strategis dalam mengelola Aparatur Sipil Negara

Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
2.	Indeks Profesionalitas ASN	positif	Indeks	78,30	78,50	78,85	79,20	79,65	80,15	81,00	
3.	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak 2025-2029 ini memuat hal-hal penting dalam menentukan arah Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu sangat diperlukan profesionalitas, integritas dan etos kerja dari seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak dalam menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi melalui mekanisme yang efektif, terstruktur dan terarah sehingga indikator kinerja pada setiap tingkatan dapat dicapai sesuai kerangka acuan yang telah ditentukan, dan jika ada faktor penghambat untuk mencapai target yang telah ditetapkan dapat diketahui sejak dini sehingga dapat dicarikan solusi untuk mengantisipasinya.

Semoga dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak 2025-2029, dapat memberikan arah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan guna terwujudnya Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berAKHLAK sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang amanah dan Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan humanis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak

